

PT Utama Karya (Persero) Tidak Memiliki Dokumen di bawah ini sebagai Dokumen Informasi Publik

No.	Nama Informasi Publik	Kategori	Keterangan
1.	Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Nama PPID Pelaksana a. Informasi Wajib Berkala b. Informasi Tersedia Setiap Saat c. Daftar Informasi Publik d. Permohonan Informasi Online (Bukan Mengunduh Formulir Permohonan)	Aspek Pengembangan Website	Seluruh pelayanan informasi publik PT Utama Karya (Persero) Group terlaksana secara terpusat di PPID Utama Karya. Rincian PPID Pelaksana (Anak Perusahaan) : -PT HK Realtindo -PT Hakaaston -PT HK Infrastruktur -PT Utama Marga Waskita -EPC Energy Singapore
2.	Gambar Rancangan Pekerjaan	Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	Gambar Rancangan Pekerjaan tidak dipersyaratkan dalam pekerjaan kajian prioritas ruas Jalan Tol Trans Sumatera.
3.	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak dipersyaratkan dalam proses kedua pengadaan pekerjaan terkait monitoring lingkungan dan kajian jalan tol.
4.	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak dipersyaratkan pada paket pengadaan pengawasan dan pekerjaan peningkatan kualitas jalan karena bidang pengawasan dan peningkatan kualitas jalan lebih terkait dengan sertifikasi keahlian teknis konstruksi, manajemen proyek, dan regulasi terkait infrastruktur, bukan hak kekayaan intelektual.
5.	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;	Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh peserta telah menerima hasil dari proses pengadaan yang dilakukan, tanpa adanya keberatan atau permintaan peninjauan kembali. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya berita acara sanggah atau sanggah banding.

6.	Surat Perintah Mulai Kerja	Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak dipersyaratkan dalam proses pengadaan pekerjaan jasa konsultasi kajian penyusunan prioritas pembangunan ruas jalan tol trans sumatera karena nilai pekerjaan di bawah rp 1 miliar.
7.	Surat Jaminan Pelaksanaan	Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak dipersyaratkan dalam proses kedua pengadaan pekerjaan terkait monitoring lingkungan dan kajian jalan tol.
8.	Surat Jaminan Uang Muka	Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak dipersyaratkan dalam proses kedua pengadaan pekerjaan terkait monitoring lingkungan dan kajian jalan tol.
9.	Surat Jaminan Pemeliharaan	Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak dipersyaratkan dalam proses kedua pengadaan pekerjaan terkait monitoring lingkungan dan kajian jalan tol.
10.	Surat Perintah Membayar	Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak dipersyaratkan dalam proses kedua pengadaan pekerjaan terkait monitoring lingkungan dan kajian jalan tol.
11.	Surat Perintah Pencairan Dana	Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak dipersyaratkan dalam proses kedua pengadaan pekerjaan terkait monitoring lingkungan dan kajian jalan tol.
12.	Laporan Penyelesaian Pekerjaan	Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	Masih terdapat supervisi output kajian dalam pekerjaan jasa konsultasi kajian penyusunan prioritas pembangunan ruas jalan tol trans sumatera.
13.	Sebutkan 2 (dua) pelelangan dalam LPSE atau sejenisnya Tahun 2024 a. Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi b. Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi	Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	Hutama Karya tidak menggunakan LPSE untuk pengadaan dari internal, namun tetap memanfaatkan LPSE sebagai platform lelang untuk proyek-proyek besar yang diprakarsai oleh pihak eksternal, terutama pemerintah dan BUMN lain.
14.	Badan Publik menyediakan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi terakhir sesuai standar Perki 1 Tahun 2021	Aspek Kelembagaan	Pada tahun 2023-2024, telah dilakukan uji konsekuensi namun tidak terdapat informasi yang dikecualikan.



Inovasi Untuk Solusi

Kantor Pusat

HK TOWER

Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 8

Cawang, Jakarta Timur-13340

P. (021) 8193708

E. pthk@hutamakarya.com

15.	Daftar Informasi Publik Badan Publik telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka	Aspek Kelembagaan	Selama tahun 2023-2024, tidak terdapat informasi yang dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka.
16.	Badan Publik menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa	Aspek Kelembagaan	Selama tahun 2024, di Utama Karya belum terdapat pengajuan keberatan/ penyelesaian sengketa hingga menghasilkan informasi publik lain yang dinyatakan terbuka.

Jakarta, 1 Oktober 2024

PT Utama Karya (Persero)

Sekretaris Perusahaan



Adjib Al Hakim

Executive Vice President

C.q. Atasan PPID